

**PENGARUH VARIABEL-VARIABEL NON-EKONOMI TERHADAP
STATUS KEMISKINAN RUMAH TANGGA DI KOTA PADANG
(Studi Kasus Kecamatan Kuranji)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Strata Satu (S1)*



Oleh:

**UTRI SAFRI YETMI
1107759/2011**

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2016**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

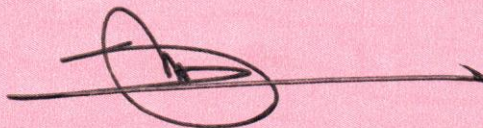
**PENGARUH VARIABEL-VARIABEL NON EKONOMI TERHADAP
STATUS KEMISKINAN RUMAH TANGGA DI KOTA PADANG
(Studi Kasus Kecamatan Kuranji)**

Nama : Utri Safri Yetmi
Nim/Bp : 1107759 / 2011
Keahlian : Ekonomi Sumber Daya Manusia
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Fakultas : Ekonomi

Padang, Januari 2016

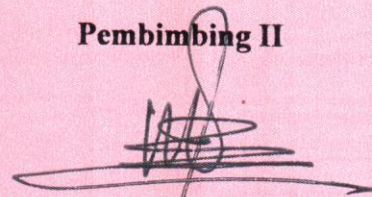
Disetujui oleh:

Pembimbing I



Prof. Dr. Syamsul Amar B, M.S
NIP: 19571021 198603 1 001

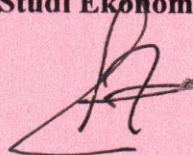
Pembimbing II



Muhammad Irfan SE, M.Si
NIP: 19770409 200312 1 002

Diketahui oleh:

Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan



Drs. Ali Anis, M.S
NIP: 19591129 198602 1 001

HALAMAN PENGESAHAN


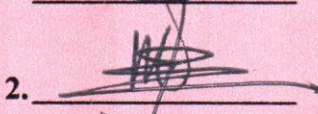
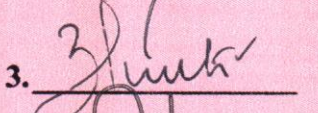
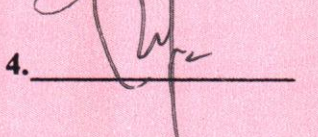
**Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang**

**PENGARUH VARIABEL-VARIABEL NON EKONOMI TERHADAP
STATUS KEMISKINAN RUMAH TANGGA DI KOTA PADANG
(Studi Kasus Kecamatan Kuranji)**

**Nama : Utri Safri Yetmi
Nim/Bp : 1107759/ 2011
Keahlian : Ekonomi Sumber Daya Manusia
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Fakultas : Ekonomi**

Padang, Januari 2016

Penguji:

No. Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	: Prof. Dr. Syamsul Amar B, MS	1. 
2. Sekretaris	: Muhammad Irfan SE, M.Si	2. 
3. Anggota	: Dr. Sri Ulfa Sentosa, MS	3. 
4. Anggota	: Mike Triani, SE.MM	4. 

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Utri Safri Yetmi
Nim/ Tahun Masuk : 1107759/2011
Tempat/ Tanggal Lahir : Bukittinggi / 29 November 1992
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Keahlian : Ekonomi Sumber Daya Manusia
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Jln. Teknologi 2 Siteba, Padang
No. HP/telp. : 083180400121
Judul Skripsi : Pengaruh Variabel-Variabel Non-Ekonomi Terhadap Status Kemiskinan Rumah tangga di Kota Padang (Studi kasus Kecamatan Kuranji)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis/skripsi saya ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini merupakan gagasan, rumusan dan penilaian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis/skripsi ini sah apabila telah ditandatangani **Asli** oleh Tim Pembimbing, Tim Penguji dan Ketua Program Studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima **Sanksi Akademik** berupa pencabutan gelar yang diperoleh karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Padang, Januari 2016
Yang Menyatakan



UTRI SAFRI YETMI
Nim/Bp. 1107759/2011

ABSTRAK

UTRI SAFRI YETMI (2011/1107759) Pengaruh Variabel-Variabel Non-Ekonomi Terhadap Status Kemiskinan Rumah tangga di Kota Padang (Studi Kasus Kecamatan Kuranji). Skripsi. Program Studi Ekonomi Pembangunan. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Padang. Pembimbing 1 Bapak Prof. Dr. Syamsul Amar. B. MS dan Pembimbing 2 Bapak Muhammad Irfan SE.MSi

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh (1) Tingkat pendidikan kepala rumah tangga terhadap status kemiskinan rumah tangga (2) Pengaruh jenis pekerjaan kepala rumah tangga terhadap status kemiskinan rumah tangga (3) Pengaruh gender kepala rumah tangga terhadap status kemiskinan rumah tangga (4) Pengaruh beban ketergantungan terhadap status kemiskinan rumah tangga (5) Pengaruh tingkat pendidikan kepala rumah tangga, jenis pekerjaan kepala rumah tangga, gender kepala rumah tangga dan beban ketergantungan terhadap status kemiskinan rumah tangga di kecamatan Kuranji Kota Padang.

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dan asosiatif. Jenis data penelitian adalah data primer dengan Populasi penelitian seluruh rumah tangga di kecamatan Kuranji Kota Padang yang berjumlah 34.349 kepala rumah tangga. Teknik pengambilan sampel adalah dengan multistage random sampling yaitu sebanyak 100 rumah tangga. Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif dan induktif melalui model logistic yang terdiri atas uji chi-square, wald test dan odd rasio.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa secara parsial (1) Tingkat pendidikan kepala rumah tangga berpengaruh signifikan terhadap status kemiskinan rumah tangga ($\text{prob } 0,002 < \alpha = 0,05$), dengan odd ratio 5,101 (2) Jenis pekerjaan kepala rumah tangga berpengaruh signifikan terhadap status kemiskinan rumah tangga ($\text{prob } 0,014 < \alpha = 0,05$), dengan odd ratio 3,682. (3) Gender kepala rumah tangga berpengaruh tidak signifikan terhadap kesejahteraan keluarga ($\text{prob } 0,226 > \alpha = 0,05$) dengan odd ratio 2,270. (4) Beban ketergantungan berpengaruh signifikan terhadap status kemiskinan rumah tangga ($\text{prob } 0,038 < \alpha = 0,05$), dengan odd ratio 1,029. (8) Secara bersama-sama tingkat pendidikan kepala rumah tangga, Jenis pekerjaan kepala rumah tangga, Gender kepala rumah tangga dan Beban ketergantungan berpengaruh signifikan terhadap status kemiskinan rumah tangga ($\text{prob } 0,0000 < \alpha = 0,05$).

Dari hasil penelitian ini, maka disarankan kepada pemerintah untuk meningkatkan perhatian terhadap rumah tangga yang berstatus miskin mulai dari aspek, tingkat pendidikan kepala rumah tangga, jenis pekerjaan kepala rumah tangga, gender kepala rumah tangga dan beban ketergantungan agar rumah tangga mampu memenuhi semua kebutuhan dasar hidupnya termasuk standar hidup yang dimiliki dan menjadi rumah tangga yang berstatus tidak miskin.

Kata kunci : Status kemiskinan rumah tangga, tingkat pendidikan kepala rumah tangga, jenis pekerjaan kepala rumah tangga, gender kepala rumah tangga, dan beban ketergantungan.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Variabel-variabel Non-Ekonomi Terhadap Status Kemiskinan Rumah Tangga di Kota Padang. (Studi Kasus Kecamatan Kuranji)**

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi pembangunan khususnya kajian ekonomi sumber daya manusia serta untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana ekonomi di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Terealisasinya skripsi ini tidak terlepas berkat bantuan berbagai pihak. Maka dari itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Prof.Dr Syamsul Amar B.MS selaku pembimbing I dan Bapak Muhammad Irfan SE.MSi selaku pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk membimbing dan memberikan saran dalam penyelesaian skripsi ini. Selain itu penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Yunia Wardi, Drs, M. Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan dukungan berupa kelengkapan fasilitas sarana dan prasarana perkuliahan.
2. Ibu Dr. Sri Ulfa Sentosa. MS dan Ibu Mike Triani SE.MM selaku penguji I dan II.
3. Bapak Drs. H. Ali Anis, M.S selaku ketua dan Ibu Novya Zulva Riani, SE. M.Si selaku sekretaris Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas

Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan motivasi moril dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak dan Ibu staf pengajar serta staf pegawai Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan bantuan pengetahuan dan proses administrasi yang bermanfaat selama masa perkuliahan.
5. Kedua orang tua beserta adik-adik, kakak-kakak, teman-teman dan orang sekitar yang terus memberikan doa dan dukungan baik moril maupun materil kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Rekan-rekan seperjuangan Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang angkatan 2011 tanpa terkecuali.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak luput dari segala kekurangan, untuk itu saran dan kritikan yang sifatnya membangun dari pembaca sangat diharapkan. Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih.

Padang, Januari 2016

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan Penelitian.....	15
D. Manfaat Penelitian	16
BAB II KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, DAN HIPOTESIS	
A. Kajian Teori	17
B. Penelitian Terdahulu	33
C. Kerangka Konseptual.....	34
D. Hipotesis	37
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	38
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	38
C. Populasi dan Sampel	38
D. Jenis dan Sumber Data.....	41
E. Teknik pengumpulan Data	41
F. Variabel Penelitian.....	41
G. Definisi Operasional	42
H. Teknik Analisis Data.....	44

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil penelitian	51
1. Gambaran Umum Daerah Penelitian	51
a. Letak Geografis Kecamatan Kuranji.....	51
b. Keadaan penduduk Kecamatan Kuranji	52
c. Tingkat kemiskinan.....	54
B. Deskripsi data hasil penelitian.....	55
1. Rumah tangga Sampel dan Status Kemiskinan rumah tangga..	55
2. Tingkat Pendidikan.....	58
3. Jenis Pekerjaan.....	60
4. Gender Kepala Rumah tangga	61
5. Beban Ketergantungan.....	63
C. Analisis Induktif.....	64
1. Kelayakan dan kebaikan model logistik	64
2. Model Estimasi logistik	67
D. Pembahasan Hasil Penelitian.....	70

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	79
B. Saran	80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1	Persentase kemiskinan kota Padang tahun 2009-2013..... 5
Tabel 2	Jumlah Rumah tangga miskin berdasarkan hasil pendataan program-program sosial (PPLS) tahun 2005,2008,2011..... 6
Tabel 3	Jumlah rumah tangga menurut tingkat kesejahteraan keluarga dan kecamatan di kota Padang tahun 2009-2013 8
Tabel 4	Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan terakhir yang ditamatkan di Kecamatan Kuranji berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2010..... 10
Tabel 5	Angka beban tanggungan menurut Kecamatan tahun 2013..... 12
Tabel 6	Jumlah rumah tangga menurut kelurahan di Kecamatan Kuranji tahun 2014 39
Tabel 7	Jumlah sampel perkelurahan di kecamatan Kuranji..... 40
Tabel 8	Indikator pengukuran status kemiskinan rumah tangga..... 42
Tabel 9	Variabel skala pengukuran Data Analisis Logistic 46
Tabel 10	Jumlah daerah, jumlah penduduk dan kepadatan menurut Kelurahan Tahun 2013 52
Tabel 11	Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di Kecamatan Kuranji Tahun 2013 53
Tabel 12	Jumlah tingkat Kesejahteraan keluarga di Kota Padang 2013..... 54
Tabel 13	Jumlah rumah tangga sampel dan kategori status kemiskinan rumah tangga menurut Kelurahan di Kecamatan Kuranji..... 56
Tabel 14	Persentase rumah tangga sampel berdasarkan pada setiap indikator hidup tahun 2015 57
Tabel 15	Pendidikan kepala rumah tangga berdasarkan responden penelitian di Kecamatan Kuranji tahun 2015 59
Tabel 16	Jenis Pekerjaan kepala rumah tangga berdasarkan responden penelitian di Kecamatan Kurnaji tahun 2015 60

Tabel 17	Kondisi gender kepala rumah tangga di Kecamatan Kuranji tahun 2015	62
Tabel 18	Perbandingan beban ketergantungan berdasarkan responden penelitian di Kecamatan Kuranji tahun 2015	63
Tabel 19	Hasil uji Omnibus Test of Model Coefficient	65
Tabel 20	Hasil uji Model Summary	65
Tabel 21	Hasil uji Horner and Lemeshow test	66
Tabel 22	Hasil uji Wald	67

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Kerangka konseptual pengaruh variabel-variabel non-ekonomi terhadap status kemiskinan rumah tangga di Kota Padang (Studi kasus di kecamatan Kuranji)	35

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Kuesioner.....	85
Lampiran 2	Perhitungan MPI.....	88
Lampiran 3	Hasil Olahan Data.....	90

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan masih menjadi permasalahan terbesar bagi negara-negara berkembang. Kemiskinan mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar (*basic needs*) karena keterbatasan akses terhadap ekonomi, sosial, pendidikan kesehatan, lingkungan yang baik yang merupakan suatu hal yang pokok dalam kesejahteraan rumah tangga. Kesejahteraan dalam suatu rumah tangga ditentukan oleh miskin atau tidak miskinnya rumah tangga tersebut.

Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan merupakan salah satu dari delapan tujuan sasaran pembangunan millineium (Millenium Development Goals). MDG's merupakan deklarasi millenium yang targetnya adalah tercapainya kesejahteraan rakyat dan pembangunan masyarakat. Sasaran dan tujuan dari penanggulangan kemiskinan dan kelaparan tersebut adalah seluruh warga negara Indonesia dengan komitmen mengurangi hingga separuhnya tingkat kemiskinan.

Kemiskinan sudah diteliti meluas dalam pengukuran dan kriteria penentuan kemiskinan. Menurut BPS (2013) dalam mengukur kemiskinan dilakukan dengan mengukur indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan, sedangkan kriteria kemiskinan dari Bank Dunia dilihat dari penghasilan \$1,25 pekapita perhari. Kemudian BKKBN menjelaskan kriteria kemiskinan dilihat dari pra-sejarahtera dan keluarga sejahtera. Berbagai kriteria perhitungan kemiskinan yang telah dilakukan sebagian besar

hanya merujuk pada perhitungan kemiskinan yang dilihat dari segi pendapatan yang hanya mengukur kemiskinan dengan pendapatan dan pengeluaran dalam rumah tangga. Dalam hal ini pengukuran kemiskinan pada pendekatan pendapatan hanya melihat seberapa besar pendapatan yang dihasilkan oleh rumah tangga, karena kebutuhan dalam rumah tangga juga dilihat dari tercukupinya kebutuhan pangan, sandang dan papan yang merupakan kebutuhan yang harus terpenuhi, oleh karena itu juga penting untuk mengukur kemiskinan pada standar hidup atau perumahan yang dimiliki oleh rumah tangga seperti air yang bersih, bahan bakar untuk memasak, sanitasi yang memadai, jenis dinding rumah serta informasi yang dimiliki untuk menunjang kebutuhan sehari-hari yang digunakan oleh rumah tangga.

Kemiskinan pada standar hidup dalam rumah tangga merupakan kemiskinan yang dilihat dari non pendapatan. Bank Dunia (2007:28-46) mencatat tiga ciri yang menonjol dari kemiskinan di Indonesia. Pertama, banyak rumah tangga yang berada disekitar garis kemiskinan nasional, sehingga banyak penduduk yang meskipun tergolong tidak miskin tetapi rentan terhadap kemiskinan. Kedua, ukuran kemiskinan didasarkan pada pendapatan, sehingga tidak menggambarkan batas kemiskinan yang sebenarnya. Banyak orang yang mungkin tidak tergolong miskin dari segi pendapatan dapat dikategorikan miskin atas dasar kurangnya akses terhadap pelayanan dasar serta rendahnya indikator-indikator pembangunan manusia. Ketiga, mengingat sangat luas dan beragamnya wilayah Indonesia, perbedaan antar daerah merupakan ciri mendasar dari suatu kemiskinan.

Berdasarkan ciri kedua, kemiskinan non pendapatan menjadi masalah yang lebih serius saat ini daripada kemiskinan pendapatan, karena kemiskinan pada standar hidup juga merupakan hal yang penting dimana rumah tangga yang mengalami kekurangan dalam memenuhi kebutuhan dasar berupa gizi, kesehatan, pendidikan dan infrastruktur dasar seperti akses terhadap air bersih, sanitasi, bahan bakar untuk memasak, jenis dinding, status kepemilikan rumah dan informasi yang dimiliki oleh sebuah rumah tangga.

Pendekatan kemiskinan yang digunakan untuk melihat standar hidup dalam rumah tangga juga merupakan kemiskinan yang bersifat multidimensi dimana kemiskinan multidimensi merupakan kemiskinan yang tidak bisa digambarkan dari aspek ekonomi seperti pendapatan saja tetapi juga bisa dilihat dari non pendapatan dimana United National Development Program (UNDP) dan Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI) mulai mengembangkan untuk menggunakan konsep kemiskinan multidimensi. Hal tersebut tercermin dalam Human Development Report tahun 2010, dimana UNDP menampilkan *Multidimensional Poverty indeks* (MPI) sebagai salah satu indikator untuk menilai pembangunan manusia. Penentuan dalam MPI yang dilakukan oleh UNDP juga sejalan dengan penentuan HDI (Human Development Indeks). perbedaan mendasar adalah pada metode perhitungan yang digunakan antara MPI dan HDI.

Amartya sen (2000) juga sudah lama mengkritik pendekatan kemiskinan dengan menggunakan pendapatan. Menurut Amartya sen, pendekatan tersebut hanya memotret sebagian kecil dari begitu besarnya

persoalan kemiskinan. Persoalan kemiskinan bukan saja menyangkut kemampuan daya beli *purchasing power parity*, pendapatan atau konsumsi tapi ada dimensi yang luas dari kondisi kemiskinan. Ketika ada sebagian masyarakat tidak bisa akses terhadap pelayanan pendidikan dasar atau kesehatan dasar akibat ketidakmampuan dalam ekonomi maka itu bisa dikatakan miskin. Begitu juga terhadap standar hidup seperti rumah yang berlantaikan tanah, tidak adanya sanitasi yang baik, sumber energy untuk penerangan dan memasak yang tidak layak, maka ini bagian dari kemiskinan. (Budiantoro dkk,2013:2).

Rumah tangga dapat dikatakan miskin pada standar hidup jika tidak memadainya akses terhadap air bersih, sanitasi yang layak, bahan bakar, jenis dinding, status kepemilikan rumah serta informasi yang dimiliki. Hal ini dapat memicu pemerintah untuk merealisasikan bagaimana sebuah rumah tangga dapat memiliki standar hidup yang layak terutama pada pemerintah Kota Padang.

Tingkat kemiskinan di Kota Padang masih menjadi permasalahan dimana masih banyaknya jumlah penduduk yang mengalami tingkat kemiskinan yang dilihat dari persentase penduduk miskin, indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan dengan garis kemiskinan yang telah ditetapkan setiap tahunnya oleh BPS. Berikut disajikan kondisi kemiskinan di Kota Padang tahun 2009-2013.

Tabel 1. Persentase Kemiskinan Kota Padang Tahun 2009-2013

Tahun	Garis kemiskinan (Rupiah)	Persentase penduduk miskin (%)	Indeks kedalaman kemiskinan	Indeks keparahan kemiskinan
2009	272.329	5,72	0,93	0,25
2010	306.108	6,31	1,10	0,40
2011	326.705	6,02	0,80	0,17
2012	350.088	5,30	0,91	0,24
2013	377,943	5,02	0,54	0,11

Sumber: Badan Pusat Statistik Sumbar tahun 2013

Berdasarkan data di atas, tingkat kemiskinan Kota Padang dari tahun 2009-2013 mengalami fluktuasi yaitu peningkatan dan penurunan selama 5 tahun terakhir. Tingkat kemiskinan paling tinggi terletak pada tahun 2010, dengan persentase penduduk miskin sebesar 6,31 %, dengan garis kemiskinan sebesar Rp 306.108. Namun untuk tahun berikutnya mengalami penurunan yang hanya beberapa persen dari tahun 2010-2013.

Sebagaimana kemiskinan yang dihadapi oleh Kota Padang, kemiskinan juga dihadapi oleh beberapa Kecamatan di Kota Padang, terutama di Kecamatan Kuranji yang memiliki sembilan kelurahan dengan total jumlah rumah tangga sebanyak 30.349 rumah tangga. Dengan banyaknya jumlah rumah tangga dapat menyebabkan meningkatnya rumah tangga miskin di Kecamatan Kuranji.

Berdasarkan hasil pendataan program perlindungan sosial (PPLS) kota padang, yang dilaksanakan pada tahun 2005, 2008 dan 2011 sebanyak 19.845 rumah tangga pada tahun 2011 mengalami tingkat kemiskinan dengan total 11 Kecamatan di Kota Padang, dengan penentuan kemiskinan yang dilihat dari:

1. Status penguasaan tempat tinggal, luas lantai, jenis dinding, jenis atap, sumber air minum, cara memperoleh air minum, sumber penerangan utama, bahan bakar utama, dan tempat pembuangan tinja.
2. Kepemilikan aset dan keikutsertaan dalam program keluarga Harapan (PKH), jamkesmas dan keluarga berencana (KB). (Bappeda, Kota Padang 2011:17).

Berikut disajikan data tingkat kemiskinan rumah tangga berdasarkan hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) kota padang tahun 2005, 2008 dan 2011.

Tabel 2. Jumlah Rumah tangga Miskin Berdasarkan Pada Hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) di Kota Padang

No	Kecamatan	Rumah Tangga Miskin			Rata-Rata	Persentase (%)
		2005	2008	2011		
1	Bungus Teluk Kabung	1.817	1.691	1.559	1689	5,77
2	Koto Tengah	6.584	5.027	3.883	5164	17,66
3	Kuranji	5.520	3.357	3.513	4130	14,12
4	Lubuk Begalung	6.564	4.473	2.319	4452	15,22
5	Lubuk Kilangan	2.010	1.346	976	1444	4,93
6	Nanggalo	1.481	1.230	898	1203	4,11
7	Padang Barat	2.677	2.725	1.000	2134	7,29
8	Padang Selatan	3.425	2.800	1.606	2610	8,92
9	Padang Timur	3.454	3.681	1605	2913	9,96
10	Padang Utara	2.357	1.748	755	1620	5,54
11	Pauh	2.231	1.683	1.731	1881	6,43
Total		38.120	29.761	19.827	29.240	100

Sumber: Bappeda Kota Padang, tahun 2011

Berdasarkan Pada Tabel 2 di atas terlihat bahwa jumlah rumah tangga miskin di kota Padang terbesar terdapat di kecamatan Koto Tengah yakni sebesar 3.883 rumah tangga miskin pada tahun 2011, kemudian diikuti oleh Kecamatan Kuranji sebesar 3.513 rumah tangga miskin dan kemudian Kecamatan Lubuk begalung sebesar 2.318 rumah tangga miskin, sedangkan

rumah tangga miskin terkecil terdapat di kecamatan Padang Utara dan Kecamatan Nanggalo masing-masing sebesar 755 dan 898 rumah tangga miskin pada tahun 2011. Pada hasil PPLS yang telah dilakukan selama tiga tahun terakhir, tahun 2008 jumlah penduduk miskin di Kecamatan Koto Tengah berjumlah 5.027 rumah tangga miskin, diikuti oleh Kecamatan Kuranji dan Lubuk Begalaung sebesar 4.473 rumah tangga miskin dan Kecamatan Kuranji sebesar 2,727. Kondisi ini berubah pada tahun 2011, dimana kecamatan Koto Tengah tetap memiliki rumah tangga miskin terbesar di Kota Padang, namun jumlahnya turun secara signifikan sebesar 1.148 rumah tangga miskin dibandingkan dengan kondisi tahun 2008 lalu, diikuti oleh Kecamatan Kuranji dan Kecamatan Lubuk Begalung sebesar masing-masing 3.514 dan 2.308 rumah tangga.

Dengan demikian telah terjadi perubahan peta kemiskinan di Kota Padang tahun 2011, namun jika dilihat dari ketiga Kecamatan yang memiliki angka rumah tangga miskin terbesar di Kota Padang, namun jika dilihat dari Kecamatan Koto Tengah dan Lubuk Belagung dari tiga tahun terakhir mengalami penurunan meskipun penurunannya hanya beberapa persen tetapi jika dilihat dari Kecamatan Kuranji dari tiga tahun terakhir mengalami peningkatan rumah tangga miskin atau penduduk miskinnya tidak berkurang justru malah meningkat sebesar 156 rumah tangga dibandingkan dengan tahun 2008, hal ini diakibatkan karena bertambahnya rumah tangga yang akan meningkatkan status kemiskinan di Kecamatan Kuranji.

Masih meningkatnya kemiskinan di Kecamatan Kuranji, Badan Koordinasi Keluarga Berencana (BKKBN), dimana Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan perempuan kota Padang mencatat bahwa semakin meningkatnya jumlah rumah tangga yang belum sejahtera di Kecamatan Kuranji selama lima tahun terakhir dibandingkan dengan beberapa kecamatan lainnya di kota Padang. Berikut disajikan data jumlah keluarga menurut tingkat kesejahteraan keluarga dan Kecamatan di Kota Padang.

Tabel 3. Jumlah Keluarga Menurut Tingkat Kesejahteraan Keluarga dan Kecamatan di Kota Padang Tahun 2009-2013

Kecamatan	Pra Sejahtera					Rata-rata
	2009	2010	2011	2012	2013	
Bungus Teluk Kabung	248	203	193	193	160	199,4
Lubuk kilangan	149	152	150	178	105	146,8
Lubuk begalung	662	1,214	443	424	263	468,8
Padang selatan	417	413	433	424	263	390
Padang Timur	338	493	275	286	163	311
Padang Barat	109	154	150	172	133	143,6
Padang Utara	63	52	42	30	48	47
Nanggalo	59	115	121	103	89	97,4
Kuranji	744	850	863	1.161	926	908,8
Pauh	26	42	54	40	40	40,4
Koto tengah	1.431	1.577	1.485	1.472	1.226	1.438

Sumber: Badan Pusat Statistik Sumbar 2013

Berdasarkan pada Tabel 3 di atas Kecamatan Kuranji berada pada tingkat kesejahteraan terendah kedua di kota Padang setelah Koto Tengah dengan rata-rata tingkat pra sejahtera sebesar 908,8. Hal ini menunjukkan masih banyaknya rumah tangga di Kecamatan Kuranji yang belum memiliki tingkat kesejahteraan yang baik atau bisa dikatakan masih belum tercukupinya kebutuhan hidup yang dimiliki oleh penduduk di Kecamatan Kuranji, karena tabel di atas memperlihatkan tingkat kesejahteraan yang diukur dari makan

yang tercukupi sebanyak 2 kali sehari, tidak adanya pakaian ganti serta kondisi keadaan rumah yang menjadi standar hidup yang dimiliki oleh rumah tangga.

Masih rendahnya tingkat kesejahteraan di Kecamatan Kuranji terlihat pada lima tahun terakhir dimana tingkat kesejahteraan tertinggi terletak pada tahun 2012 dengan tingkat pra sejahtera sebesar 1.161. Walaupun hampir setiap tahunnya tingkat kesejahteraan mengalami fluktuasi selama lima tahun terakhir, namun hampir disetiap tahunnya mengalami peningkatan banyaknya penduduk yang masih belum sejahtera. Hal ini juga disebabkan karena masih banyaknya rumah tangga di Kecamatan Kuranji mengalami tingkat kemiskinan terutama pada standar hidup yang dimiliki oleh rumah tangga, karena semakin besar angka pra sejahtera maka semakin banyak orang yang tidak atau masih belum sejahtera.

Masih tingginya kemiskinan di Kecamatan Kuranji kemungkinan besar disebabkan oleh variabel-variabel non-ekonomi seperti tingkat pendidikan kepala rumah tangga, jenis pekerjaan kepala rumah tangga, gender kepala rumah tangga dan beban ketergantungan. Hal ini dikarenakan masih kurangnya kebijakan pemerintah daerah dalam upaya pengentasan kemiskinan. Masih besarnya perbedaan status kemiskinan penduduk di Kecamatan Kuranji yang belum dapat terasi sepenuhnya sebagian besar disebabkan oleh masih rendahnya tingkat pendidikan penduduk di Kecamatan Kuranji, hal ini terlihat dari masih tingginya jumlah penduduk yang tidak/belum tamat SD. Berikut disajikan data jumlah penduduk menurut

tingkat pendidikan yang ditamatkan di Kecamatan Kuranji berdasarkan pada hasil sensus penduduk 2010.

Tabel 4. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Terakhir yang ditamatkan di Kecamatan Kuranji Berdasarkan Hasil Sensus Penduduk 2010.

Tingkat Pendidikan	Jumlah penduduk (Jiwa)		
	Laki-laki	Perempuan	L+P
Tidak / belum tamat SD	8.817	8.967	17.784
SD/Sederajat	7.648	8.411	16.059
SMP/Sederajat	9.277	8.193	17.470
SMA /Sederajat	20.329	21.351	41.680
Perguruan tinggi	889	1.317	2.206
Total	46.860	30.861	95.199

Sumber: BPS Kota Padang, 2010

Dari data di atas dapat terlihat bahwa meskipun tingkat pendidikan penduduk di Kecamatan Kuranji sudah cukup baik namun masih banyak jumlah penduduk di Kecamatan Kuranji yang tidak/belum tamat SD yaitu sebesar 17.784 jiwa dibandingkan dengan SD/Sederajat yaitu sebesar 16,059 jiwa. Ditambah lagi masih sedikitnya jumlah penduduk yang menamatkan pendidikan di jenjang perguruan tinggi dibandingkan dengan tamatan SMP/SMA/Sederajat. Jadi rata-rata tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh penduduk di kecamatan Kuranji terdapat pada SMP/SMA sederajat, meskipun masih terdapatnya penduduk yang tidak/belum tamat SD.

Masih besarnya tingkat pendidikan penduduk yang masih tidak/belum tamat SD di kecamatan Kuranji hal ini kemungkinan tidak terlepas dari masih mahalny biaya pendidikan, dan juga masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya sebuah pendidikan, selain itu keinginan untuk bersekolah masih rendah. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat

pendidikan pada rumah tangga miskin di Kecamatan Kuranji masih rendah karena mereka lebih memilih bekerja daripada bersekolah hal ini disebabkan karena selain biaya pendidikan mahal, dengan bekerja maka pendapatan rumah tangga juga akan ikut bertambah yang pada akhirnya taraf kesejahteraan rumah tangga juga ikut meningkat.

Tingkat pendidikan sangat berpengaruh terhadap status kemiskinan sebuah rumah tangga, dimana jika tingkat pendidikan tinggi akan memberikan peluang kerja yang besar dan akan mempengaruhi pendapatan seseorang. Jika pendapatan meningkat maka kebutuhan ekonomi akan terpenuhi termasuk standar hidup yang mereka miliki.

Selain tingkat pendidikan yang rendah, jenis pekerjaan juga akan berpengaruh terhadap status kemiskinan rumah tangga. Semakin tinggi pendidikan maka semakin besar peluang seseorang untuk mendapatkan pekerjaan yang baik dengan pendapatan yang lebih tinggi. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi besar kemungkinan seseorang untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik seperti bekerja di sektor formal. Namun dengan masih adanya penduduk yang tidak bersekolah besar kemungkinan masyarakat di kecamatan Kuranji hanya dapat bekerja di sektor informal yang sebagian besar memiliki tingkat pendidikan yang rendah.

Disamping tingkat pendidikan dan juga jenis pekerjaan beban ketergantungan juga menentukan status kemiskinan rumah tangga, semakin banyak beban ketergantungan kepala rumah tangga maka semakin besar kemungkinan rumah tangga berstatus miskin hal ini disebabkan karena meningkatnya beban tanggungan yang di tanggung oleh kepala rumah tangga,

sehingga biaya yang dikeluarkan untuk kebutuhan hidup juga ikut meningkat. Berikut disajikan data angka beban tanggungan menurut Kecamatan tahun 2013.

Tabel 5. Angka Beban Tanggungan Menurut Kecamatan Tahun 2013.

Kecamatan	Usia			Rata-rata anggota (RT) (Jiwa)
	0-14	15-64	65+	
Bungus Teluk Kabung	7.571	15.448	839	4.60
Lubuk kilangan	15.467	34.984	1.396	4.40
Lubuk begalung	31.349	78.181	4.162	4.35
Padang selatan	16.441	39.374	3.687	4.20
Padang Timur	18.986	56.460	3.343	4.08
Padang Barat	10.142	33.103	2.536	3.77
Padang Utara	13.348	53.955	2.748	3.62
Nanggalo	14.218	42.313	2.606	4.27
Kuranji	37.579	93.456	4.751	4.47
Pauh	17.951	44.643	2.270	4.30
Koto tengah	48.312	120.147	6.108	4.44

Sumber: BPS Kota Padang, 2013

Berdasarkan pada Tabel 5 di atas, memperlihatkan angka beban tanggungan menurut kecamatan di Kota Padang. Dari data terlihat bahwa di Kecamatan Kuranji memiliki beban ketergantungan yang tinggi pada usia 15-54 tahun kemudian diikuti dengan usia 0-14 tahun. Meskipun kecamatan kuranji memiliki angka beban tanggungan yang kecil dibandingkan dengan Koto tengah namun rata-rata anggota rumah tangga di Kecamatan Kuranji lebih besar dibandingkan dengan Koto Tengah yaitu sebesar 4.47 sedangkan kecamatan Koto Tengah sebesar 4.44 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata banyaknya penduduk yang menempati satu rumah tangga di Kecamatan Kuranji adalah 4.47 anggota rumah tangga. Hal ini menunjukkan semakin besar jumlah anggota keluarga maka beban ketergantungan kepala rumah

tangga juga semakin meningkat, dan semakin besar jumlah tanggungan semakin tinggi tingkat pengeluaran yang akan dikeluarkan oleh kepala rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan hidup seluruh anggota rumah tangga.

Berdasarkan pada hal tersebut masih tingginya rata-rata anggota rumah tangga di Kecamatan Kuranji kemungkinan tidak terlepas dari masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya program Keluarga Berencana (KB) dan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah juga masih belum optimal, selain itu untuk ikut program KB juga memerlukan biaya sehingga banyak masyarakat yang berpendapatan rendah menjadi enggan untuk ikut serta dalam Program KB tersebut, sehingga banyak di antara masyarakat yang berpendapatan rendah memiliki lebih dari dua orang anak yang tentu saja akan menambah beban ketergantungan rumah tangga.

Jadi semakin tinggi beban ketergantungan sangat berpengaruh pada status kemiskinan rumah tangga. Apabila beban ketergantungan tinggi kebutuhan mendasar juga akan meningkat sehingga kebutuhan lainnya terabaikan seperti kebutuhan untuk kesehatan dan pendidikan anak termasuk juga kebutuhan akan standar hidup atau perumahan yang layak. Dengan demikian dapat disimpulkan, secara teoritis bahwa beban ketergantungan mempunyai hubungan dengan status kemiskinan rumah tangga yang akan mempengaruhi kualitas hidup.

Selain tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, dan beban ketergantungan, gender kepala rumah tangga juga menentukan status kemiskinan rumah tangga. Apabila kepala rumah tangga dikepalai oleh perempuan cenderung

untuk menjadi miskin dibandingkan dengan kepala rumah tangga yang dikepalai oleh laki-laki. Hal ini disebabkan karena adanya anggapan bahwa kaum laki-laki lebih memiliki fisik yang kuat dibandingkan dengan perempuan yang akan menyebabkan kaum laki-laki lebih besar kemungkinan untuk menghasilkan pendapatan yang tinggi dibandingkan dengan perempuan.

Disisi lain apabila perempuan yang menjadi kepala rumah tangga terutama pada rumah tangga berstatus miskin akan berdampak buruk untuk anak-anak mereka seperti mengikutsertakan anak dalam membantu orang tua mereka dalam mencari kebutuhan hidup sehingga pendidikan mereka akan terganggu. Namun apabila kepala rumah tangga dikepalai laki-laki, maka perempuan dapat mengurus rumah dan juga anak-anak sehingga kebutuhan anak mereka dapat teratasi dengan baik.

Berdasarkan pada uraian diatas maka menarik untuk menganalisis kemiskinan di kecamatan Kuranji, terutama pada masih rendahnya tingkat kesejahteraan rumah tangga ditambah lagi dengan masih meningkatnya jumlah rumah tangga miskin yang dilakukan oleh BPS pada Program-Program Perlindungan Sosial yang telah dilakukan selama tiga tahun terakhir.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti tertarik melakukan penelitian untuk mendeskripsikan lebih jauh tentang kondisi tersebut dengan judul **“Pengaruh Variabel–Variabel Non-Ekonomi terhadap Status Kemiskinan Rumah tangga di Kota Padang (Studi Kasus Kecamatan Kuranji)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di jelaskan di atas maka rumusan masalah penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Sejauhmana pengaruh tingkat pendidikan kepala rumah tangga terhadap status kemiskinan rumah tangga di kecamatan Kuranji?
2. Sejauhmana pengaruh jenis pekerjaan kepala rumah tangga terhadap status kemiskinan rumah tangga di kecamatan Kuranji?
3. Sejauhmana pengaruh gender kepala rumah tangga terhadap status kemiskinan rumah tangga di kecamatan Kuranji?
4. Sejauhmana beban ketergantungan terhadap status kemiskinan rumah tangga di kecamatan Kuranji?
5. Sejauhmana pengaruh tingkat pendidikan, jenis pekerjaan kepala rumah tangga, gender kepala rumah tangga dan beban ketergantungan terhadap status kemiskinan rumah tangga di kecamatan Kuranji?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui pengaruh tingkat pendidikan kepala rumah tangga terhadap status kemiskinan rumah tangga di kecamatan Kuranji.
2. Mengetahui pengaruh jenis pekerjaan kepala rumah tangga terhadap status kemiskinan rumah tangga di kecamatan Kuranji.
3. Mengetahui pengaruh gender kepala rumah tangga terhadap status kemiskinan rumah tangga di kecamatan Kuranji.

4. Mengetahui pengaruh beban ketergantungan terhadap status kemiskinan rumah tangga di kecamatan Kuranji.
5. Mengetahui pengaruh tingkat pendidikan kepala rumah tangga, jenis pekerjaan kepala rumah tangga, gender kepala rumah tangga, dan beban ketergantungan terhadap status kemiskinan rumah tangga di kecamatan Kuranji.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini secara umum diharapkan dapat berguna sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti, sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
2. Bagi pengembangan ilmu ekonomi mikro, ilmu ekonomi makro dan ilmu ekonomi pembangunan.
3. Sebagai salah satu studi yang diharapkan dapat dijadikan bahan referensi bagi yang ingin melakukan penelitian yang berkaitan dengan tingkat kemiskinan disuatu wilayah baik bagi mahasiswa yang membutuhkan bahan acuan untuk penelitian yang sejenis maupun kalangan umum.

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

A. Landasan Teori

1. Konsep dan Teori Kemiskinan

a. Definisi kemiskinan

Kemiskinan telah banyak ditelaah oleh para ilmuwan sosial dari berbagai latar belakang disiplin ilmu ekonomi dengan menggunakan berbagai ukuran untuk menandai berbagai aspek, dari standar hidup, pendapatan dan distribusi pendapatan. Secara umum kemiskinan diartikan sebagai ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan primer dalam kehidupannya. Kemiskinan merupakan suatu kondisi kehidupan serba kekurangan yang dialami seseorang sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan minimal kehidupannya (Harahap, 2006:7).

Menurut Todaro (2006:270) mayoritas penduduk yang paling menderita terhadap kemiskinan adalah kaum wanita dan anak-anak. Karena kekurangan terhadap gizi, dan mereka pula yang paling sedikit menerima pelayanan kesehatan, air bersih, sanitasi dan berbagai bentuk jasa sosial lainnya. Meskipun kemiskinan menurut konsep ekonomi dapat diukur dari kecukupan pendapatan, kemiskinan juga dapat didefinisikan dari ciri-ciri yang melekat pada penduduk miskin tersebut. Ciri tersebut antara lain ditandai oleh sikap dan tingkah laku penduduk yang menerima keadaan yang seakan-akan tidak dapat diubah, rendahnya kemajuan untuk maju, rendahnya kualitas sumber daya manusia, rendahnya produktifitas,

dan terbatasnya kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan.

Keberadaan Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan merupakan upaya dalam pengentasan kemiskinan. SNPK sebelumnya memandang kemiskinan secara parsial sebagai kondisi kekurangan seperti kekurangan pangan, kekurangan pendapatan, kekurangan pemenuhan kebutuhan dasar, namun sekarang pandangan mengenai kemiskinan mulai lebih multidimensional.

Dalam Tim Nasional Percepatan Penanggulangan kemiskinan (TNP2K: 2011) , kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi seseorang atau sekelompok orang, baik itu laki-laki dan perempuan yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hal ini dijelaskan bahwa kemiskinan tidak hanya melalui ekonomi semata tetapi juga hak-hak dasar dalam menjalani kehidupan. Kemudian hidup dalam kemiskinan bukan hanya hidup dalam kekurangan uang dan tingkat pendidikan rendah tetapi juga pada tingkat kesehatan, pendidikan rendah, dan termasuk standar hidup dan juga ketidakberdayaan dalam menentukan jalan hidupnya sendiri.

Kemiskinan mempunyai pengertian yang luas dan memang tidak mudah untuk mengukurnya, namun ukuran kemiskinan secara umum digunakan yaitu kemiskinan absolut yang merupakan sejumlah penduduk yang tidak mampu mendapatkan sumberdaya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk hidup, mereka hidup dibawah tingkat

pendapatan riil minimum atau dibawah garis kemiskinan internasional. Garis tersebut tidak mengenal tapal batas antar negara, tidak bergantung pada tingkat pendapatan perkapita suatu negara, dan juga memperhitungkan perbedaan tingkat harga antar negara dengan mengukur penduduk miskin sebagai orang yang hidup kurang dari US\$1 dan US\$2 perhari dalam dolar PPP. Kemiskinan absolut dapat diukur dengan angka atau hitungan perkepala (*headcount*), *H*, untuk mengetahui seberapa banyak orang yang penghasilannya berada dibawah garis kemiskinan absolut. (Todaro, 2006:243).

Selain kemiskinan absolut juga terdapat kemiskinan relatif yaitu pendapatan seseorang yang sudah berada di atas garis kemiskinan, namun relative masih rendah dibandingkan dengan pendapatan masyarakat, maka orang atau keluarga tersebut masih berada dalam keadaan miskin. Kemiskinan relative juga dipengaruhi oleh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan. kemiskinan relative erat kaitannya dengan masalah pembangunan yang bersifat struktural, yakni kebijaksanaan pembangunan belum menjangkau seluruh masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan pendapatan.

b. Ukuran Kemiskinan

Berbagai macam ukuran kemiskinan yang telah dikembangkan di Indonesia untuk menetapkan, menghitung dan mengetahui bagaimana tingkat kemiskinan suatu negara yang menggambarkan bagaimana kondisi

kemiskinan itu sendiri. Untuk itu telah berkembang berbagai upaya-upaya dalam melakukan pengukuran kemiskinan.

Menurut BPS (2013), melalui Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic need approach*). Metode yang digunakan adalah terdiri dari garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan non makanan (GKNM), yang merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kalori perkapita perhari. Pengukuran kemiskinan dihitung berdasarkan pada jumlah rupiah konsumsi berupa makanan yaitu kurang dari 2.100 kalori per orang per hari. patokan kecukupan 2.100 kalori ini berlaku untuk susunan umur, jenis kelamin, dan perkiraan tingkat kegiatan fisik, berat badan, serta perkiraan status fisiologis penduduk.

Kemudian pada level internasional World mengembangkan beberapa pengukuran kemiskinan (2007:30) yaitu :

- a. Indeks Angka kemiskinan (*poverty headcount index, Po*). indeks ini adalah angka jumlah penduduk yang memiliki tingkat konsumsi di bawah garis kemiskinan. indeks ini disebut sebagai angka insiden kemiskinan (*poverty incidence*). Ukuran ini tidak berubah meskipun seseorang penduduk miskin menjadi lebih miskin atau menjadi lebih sejahtera, selama orang tersebut berada di bawah garis kemiskinan.
- b. Indeks kedalaman kemiskinan (*Poverty Gap Index, P1*) yang merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk

miskin terhadap garis kemiskinan, indeks ini dapat menggambarkan tingkat kedalaman kemiskinan dengan lebih baik tetapi tidak menunjukkan tingkat keparahan kemiskinan.

- c. Indeks keparahan kemiskinan (*Poverty Severity Index*, P2) yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Selanjutnya menurut Badan koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN:2014) mengukur tingkat kemiskinan berdasarkan kriteria Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Pra Sejahtera 1. Dalam pengukuran kemiskinan ini, terdapat lima indikator pengukuran yaitu pelaksanaan ibadah dengan baik, minum makanan dua kali sehari, keberagaman pakaian dimana membeli lebih dari satu stel pakaian per orang per tahun, luas lantai dan jenis lantai dan akses layanan kesehatan. Indikator yang tercantum dalam lima kriteria tersebut akan dikatakan keluarga miskin prasejahtera dan sejahtera I apabila salah satu pada indikator tersebut tidak terpenuhi.

United National Development Program (UNDP) juga mengembangkan ukuran kemiskinan yaitu *Human Poverty Index* (HPI) atau indeks kemiskinan manusia. Menurut Todaro (2006:247) HPI diukur dalam satuan hilangnya tiga hal utama yaitu kehidupan lebih dari 30 persen penduduk negara-negara paling miskin cenderung hidup kurang dari 40 tahun) pendidikan dasar (diukur dengan persentase penduduk dewasa yang buta huruf) dan keseluruhan ketetapan ekonomi (diukur oleh

persentase penduduk yang tidak memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan dan air bersih ditambah persentase anak-anak dibawah usia 5 tahun yang kekurangan berat badan).

Selain itu dalam perkembangan terbaru, UNDP juga mengembangkan ukuran kemiskinan yang disebut dengan Multidimensional Poverty Index (MPI) dengan mengukur tingkat kemiskinan yang diukur dari beberapa dimensi kemiskinan yaitu dimensi tingkat pendidikan, dimensi kesehatan dan dimensi standar hidup yang dimiliki oleh suatu rumah tangga.

Jadi terdapat beberapa ukuran yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan rumah tangga. Baik dari pendapatan yang dimiliki oleh masyarakat maupun pengeluaran yang akan dikeluarkan. Selain itu kemiskinan juga dapat diukur dengan tingkat kehidupan baik itu ekonomi maupun sosial dan juga dari tingkat pendidikan dan kesehatan yang dimiliki oleh masyarakat. Kemiskinan pada umumnya hanya diukur dengan tingkat pendapatan dan konsumsi suatu masyarakat, Namun kemiskinan juga dapat diukur secara multidimensi.

c. Kemiskinan Multidimensi

Kemiskinan itu bersifat multidimensi, artinya karena kebutuhan manusia itu bermacam-macam, maka kemiskinan pun memiliki banyak aspek. Dilihat dari kebijakan umum, maka kemiskinan meliputi aspek primer yang berupa miskin akan aset, organisasi sosial politik, dan pengetahuan serta keterampilan, dan aspek keuangan informasi. Dimensi-

dimensi kemiskinan tersebut termanifestasikan dalam bentuk kekurangan gizi, air, perumahan yang sehat, perawatan kesehatan yang baik dan tingkat pendidikan yang rendah (Arsyad, 2000:236).

Selain itu, dimensi-dimensi kemiskinan saling berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung, karena itu kemajuan pada kemunduran pada salah satu aspek dapat mempengaruhi kemajuan dan kemunduran pada aspek lainnya.

Menurut Sen, dalam Ambariyanto (2012:118) kemiskinan seharusnya berkaitan erat dengan tidak tersedianya kebutuhan dasar atau kapabilitas dasar. Hal ini berarti bahwa kemiskinan adalah fenomena multidimensi, maka dari itu seharusnya kesejahteraan diukur menggunakan indikator-indikator yang mempertimbangkan berbagai aspek. Keuntungan dari pendekatan multidimensi terhadap kemiskinan ini ialah kemampuannya dalam menunjukkan tingkat kemiskinan yang mengakar pada masyarakat.

Selanjutnya menurut penelitian Ambariyanto (2013:121) kemiskinan dapat dilihat dari beberapa pendekatan yaitu pendekatan moneter dan pendekatan non moneter. Pendekatan moneter digunakan oleh kelompok *welfarist* dan *utilitarians*, pendekatan moneter ini seperti mengukur pendapatan perkapita dan pengeluaran/konsumsi perkapita. Sedangkan pendekatan non moneter lebih digunakan oleh kelompok *non-welfarist*. Pendekatan non moneter mengukur kemiskinan dari indikator-indikator seperti indikator kesehatan dan pendidikan.

Kemiskinan diukur berdasarkan level kemiskinan internasional sebesar \$1 perhari. Hal ini dikatakan oleh Todaro (2006:243), orang tidak akan menerima level kemiskinan internasional sebesar \$1 per hari begitu saja ketika membuat program penanggulangan kemiskinan di suatu daerah. Salah satu strategis praktis untuk menentukan garis kemiskinan lokal adalah dengan menetapkan sekelompok makanan yang cukup, yang didasarkan atas persyaratan nutrisi yang dibutuhkan tubuh, kemudian menggunakan data survey rumah tangga yang dapat mengidentifikasi sekelompok makanan yang bisa dibeli oleh rumah tangga yang hampir memenuhi persyaratan nutrisi, kemudian ditambahkan pengeluaran-pengeluaran untuk kebutuhan dasar yang lain seperti tempat tinggal, pendidikan dan sarana kesehatan untuk menentukan garis kemiskinan.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan

Kemiskinan yang menimpa sekelompok masyarakat berhubungan dengan status sosial ekonominya dan potensi wilayah. Faktor sosial ekonomi yaitu faktor yang berasal dari dalam diri masyarakat itu sendiri dan cenderung melekat pada dirinya sendiri seperti tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah dan produktifitas yang rendah. Disisi lain, faktor yang berasal dari luar berhubungan dengan potensi alamiah, teknologi dan rendahnya aksesibilitas terhadap kelembagaan yang ada. Kedua faktor tersebut menentukan aksesibilitas masyarakat miskin dalam memanfaatkan peluang-peluang ekonomi dalam menunjang kehidupannya. Kemiskinan sesungguhnya merupakan suatu fenomena yang kait mengait antara satu faktor dengan faktor

yang lainnya. Oleh karena itu untuk mengkaji masalah kemiskinan harus diperhatikan jalinan faktor-faktor penyebab kemiskinan dan faktor-faktor yang berada dibalik kemiskinan tersebut, (Amar, 2012:25). Oleh karena itu kemiskinan terjadi disebabkan oleh faktor-faktor baik itu berupa dari faktor sosial maupun dari faktor yang berasal dari luar yang berhubungan dengan berbagai potensi alamiah, hal ini lah yang menyebabkan kemiskinan berasal dari berbagai faktor yang akan menyebabkan masyarakat terjerumus kedalam jurang kemiskinan.

Haughton dan Khandker (2009:145) merinci bahwa terdapat perbedaan akar penyebab kemiskinan pada setiap unit analisis kemiskinan. Unit analisis dan faktor penyebab kemiskinan yaitu: (i) Karakteristik pada tingkat daerah meliputi kerentanan terhadap banjir atau badai, keterpencilan, kualitas tata kelola pemerintahan dan hak kepemilikan; (ii) karakteristik pada level komunitas atau masyarakat mencakup ketersediaan infrastruktur (jalan, air, listrik), layanan pendidikan dan kesehatan, kedekatan jarak kepasar dan hubungan sosial;(iii) pada level rumah tangga atau individu, faktor yang mempengaruhinya semakin kompleks diantaranya: demografis berupa ukuran rumah tangga, struktur umur, beban ketergantungan, dan gender kepala rumah tangga; faktor ekonomi berupa status pekerjaan, jam kerja dan kepemilikan kekayaan; faktor sosial berupa status kesehatan, pendidikan dan perumahan.

Kemiskinan pada rumah tangga memang ditentukan oleh pendapatan atau penghasilan yang mereka miliki, hal ini memungkinkan rumah tangga untuk terhindar dari jurang kemiskinan. Namun dengan tingginya pendapatan

belum tentu suatu rumah tangga tidak memiliki standar hidup yang layak yang dapat menyebabkan rumah tangga tersebut tidak memiliki kesejahteraan. Menurut Budiantoro,dkk (2013:3) standar hidup mencerminkan pola kehidupan keseharian dari masyarakat, oleh karena itu bukan hanya dari segi pendapatan, kemiskinan juga harus dilihat dari standar hidup yang dimiliki karena kemiskinan pada standar hidup dapat menjadikan masyarakat tidak dapat memenuhi kualitas hidup yang menjadi tolak ukur dari kehidupan atau keseharian masyarakat di dalam sebuah rumah tangga.

a. Tingkat pendidikan

Kemiskinan merupakan situasi serba kekurangan yang terjadi bukan karena kehendak oleh si miskin. Penduduk pada umumnya ditandai oleh rendahnya tingkat pendidikan, produktifitas kerja, pendapatan, kesehatan, dan gizi serta kesejahteraannya sehingga menunjukkan lingkaran ketidakberdayaan. Kemiskinan disebabkan oleh terbatasnya sumber daya manusia yang dimiliki dan dimanfaatkan terutama dari tingkat pendidikan formal maupun informal dan membawa konsekuensi terhadap pendidikan informal yang rendah (Supriatna, 2000:196). oleh karena itu tingkat pendidikan yang rendah berdampak pada kemiskinan rumah tangga.

Menurut Todaro (2000:406) pendidikan adalah kunci untuk menciptakan, mengadopsi, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, namun penyebaran kesempatan untuk memperoleh akses kependidikan tersebut sangat tidak merata terutama bagi kalangan masyarakat miskin.

Pendidikan merupakan upaya untuk mengantarkan manusia kearah dewasa. Melalui pendidikan kesempatan untuk membina kemampuannya dan mengatur pola kehidupan dan membuka kesempatan untuk mengupayakan perbaikan dan kemajuan kehidupan masyarakat.

Berdasarkan UU-SPN tahun 2003 (pasal 1 ayat 1) pengertian pendidikan adalah:

“Serangkaian usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan susunan belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.”

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan merupakan suatu usaha yang perlu dimiliki oleh seseorang untuk dapat mengembangkan potensi diri yang berguna untuk kegiatan sehari-hari sebagai masyarakat yang berbangsa dan bernegara untuk meningkatkan kualitas hidup.

Dalam meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan menjamin perkembangan sosial ekonomi, pendidikan adalah hal yang sangat fundamental. Di samping itu pendidikan dapat dijadikan pedoman dalam menghadapi tantangan hidup yang kompleks, tanpa pendidikan seseorang akan mengalami kesulitan dalam memenuhi tuntutan hidupnya dengan majunya teknologi maka kebutuhan manusia pun akan meningkat. Defenisi tentang pendidikan terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan perubahan paradigma masyarakat.

Dalam arti sempit pendidikan merupakan proses pengajaran yang diselenggarakan oleh lembaga sekolah sebagai lembaga pendidikan formal. Sedangkan dalam arti luas, pendidikan merupakan usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga dalam masyarakat dan pemerintah dalam melakukan kegiatan bimbingan, Pengajaran dan pelatihan yang berlangsung di luar sekolah atau di sekolah untuk mempersiapkan peserta didik dalam memainkan perannya secara tepat dalam berbagai lingkungan hidup.

Dengan beberapa pengertian di atas, pendidikan merupakan langkah yang paling strategis dalam upaya mengatasi kemiskinan terutama yang berkaitan dengan standar hidup yang dimiliki oleh rumah tangga. Selanjutnya pendidikan kepala rumah tangga merupakan salah satu hal yang mempengaruhi status kemiskinan rumah tangga, dengan pendidikan yang semakin tinggi kecil peluang rumah tangga untuk berstatus miskin. Sehingga dengan tingginya pendidikan, rumah tangga mampu untuk memenuhi semua kebutuhan rumah tangga terutama pada standar hidup atau perumahan yang dimiliki. Oleh sebab itu pendidikan merupakan cara yang efektif untuk menghindari rumah tangga untuk berstatus miskin.

b. Pekerjaan Kepala Rumah Tangga

Jenis pekerjaan kepala rumah tangga terbagi atas 2 kelompok yaitu *white collar workers* dan *blue collar workers*. *White collar workers* merupakan jenis pekerjaan yang untuk memasukinya dibutuhkan tingkat pendidikan formal dan keahlian yang tinggi. Sedangkan *blue collar*

workers merupakan jenis pekerjaan yang untuk memasukinya tidak dibutuhkan tingkat pendidikan yang tinggi.

Badan Pusat Statistik (2004) mengelompokkan pekerjaan atas dua kelompok yaitu pekerjaan formal dan pekerjaan informal. Pekerjaan informal yaitu penduduk yang bekerja dengan status kedudukan pekerjaan usaha sendiri, dibantu oleh buruh yang tidak dibayar dan tidak tetap, pekerjaan bebas baik pertanian maupun non pertanian. Pekerja formal adalah buruh disektor formal, pengawas mandor, pekerja administrasi, kelompok pegawai tinggi, manager, pengusaha besar, dan pengusaha sedang. Selanjutnya pekerjaan kepala rumah tangga tersebut berpengaruh terhadap status kemiskinan rumah tangga, kepala rumah tangga yang bekerja di sektor formal cenderung berstatus tidak miskin dikarenakan kepala rumah tangga di sektor formal mempunyai pendapatan yang tetap sementara kepala rumah tangga yang bekerja di sektor informal pendapatannya tidak tetap, sehingga rumah tangga yang kepala rumah tangganya bekerja di sektor informal cenderung berstatus miskin.

Pekerjaan merupakan salah satu sumber pendapatan, hal ini disebabkan adanya upah yang diberikan atas jasa yang telah diterima oleh orang lain. Apabila pekerjaan tersebut sesuai dengan kemampuan yang ada pada dirinya, sehingga yang bersangkutan bangga untuk melakukan pekerjaan tersebut. Tentunya faktor jenis pekerjaan yang beragam mengarah pada kemampuan finansialnya, contohnya seseorang yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil akan memiliki penghasilan yang berbeda dengan yang bukan Pegawai Negeri Sipil, hal ini sedikit banyak akan berpengaruh terhadap status kemiskinan rumah tangga.

Selanjutnya Menurut Bank Dunia (2007:57) pekerjaan mempunyai korelasi yang kuat dengan kemiskinan. Kepala rumah tangga yang bekerja disektor pertanian memiliki tingkat konsumsi yang jauh lebih rendah dan dibandingkan mereka yang bekerja disektor lain. Dengan berkurangnya tingkat konsumsi, standar hidup yang dimiliki oleh rumah tangga juga dapat berdampak buruk, akibatnya bukan hanya miskin pada konsumsi sehari-hari, tetapi sebuah rumah tangga juga miskin pada standar hidup yang tidak memadai.

c. Gender Kepala Rumah Tangga

Gender kepala rumah tangga turut menentukan tingkat kemiskinan. Kalangan penduduk miskin kebanyakan kepala keluarga dikepalai oleh wanita sehingga akses mereka mendapatkan pelayanan kesehatan semakin terbatas. Begitu juga halnya pada bidang pendidikan, tingkat putus sekolah dikalangan anak-anak dari keluarga yang dikepalai oleh wanita adalah tinggi karena paksaan lingkungan bagi mereka untuk segera bekerja membantu untuk mencari nafkah keluarga semakin besar. Hal ini berbeda dengan jika kepala keluarga dikepalai oleh pria, kondisi masyarakat jauh lebih baik dibandingkan dengan jika keluarganya adalah wanita. (Amar 2012:12)

Menurut Bank Dunia (2007:57) gender mempengaruhi kemiskinan karena penilaian terhadap resiko dan kerentanan diantara beberapa tipe rumah tangga dan tahap-tahap siklus hidup yang berbeda mengidentifikasi bahwa rumah tangga miskin dengan kepala keluarga

perempuan memiliki resiko yang lebih besar untuk mengalami guncangan-guncangan negative akibat dari adanya konflik, masalah kesehatan dan resiko ekonomi.

Dengan demikian akan lebih baik jika pria yang menjadi kepala rumah tangga dibandingkan dengan wanita. Dengan pria yang menjadi kepala rumah tangga, tingkat kemiskinan juga diminisir baik itu tingkat kemiskinan pada pendapatan maupun pada standar hidup yang dimiliki oleh rumah tangga tersebut.

d. Beban Ketergantungan

Beban ketergantungan merupakan jumlah rumah tangga yang menunjukkan kelompok usia produktif atas usia non produktif. Kelompok usia tersebut berada di dalam suatu rumah tangga. Menurut Susenas (2012:7) rumah tangga adalah seorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik atau sensus dan biasanya tinggal bersama serta makan satu dapur. Rumah tangga biasa umumnya terdiri dari bapak, ibu dan anak.

Tingkat ketergantungan anggota keluarga yang tinggi menyebabkan dependensi rasio juga tinggi karena ini berkaitan dengan struktur usia yang ada di daerah dimana usia yang tidak produktif seperti usia di bawah 15 tahun kebawah jumlahnya banyak ditambah dengan jumlah usia di atas 64 tahun. Semakin tinggi tingkat ketergantungan anggota keluarga yang terjadi di masyarakat menggambarkan kondisi masyarakat yang miskin. Menurut Todaro (2000:275), Penduduk di negara

berkembang mudah sekali untuk beranak pinak karena kondisi sosial ekonomi yang ada memandang setiap pertambahan anak dari sudut kepentingan sosial, maupun jaminan sosial ekonomi dihari tua guna bertahan hidup. Anak bagi masyarakat miskin dipandang sebagai suatu investasi ekonomi yang nantinya diharapkan akan mendatangkan suatu hasil baik dalam bentuk tambahan tenaga kerja maupun sebagai sumber financial orang tua diusia lanjut, sehingga anak dapat menghasilkan investasi guna untuk membantu orang tua mereka.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pada negara berkembang mudah sekali untuk menambah anak, dengan bertambahnya anak suatu keluarga dapat menambah beban ketergantungan. Dengan bertambahnya beban ketergantungan dapat meningkatkan pengeluaran suatu rumah tangga. apabila rumah tangga tersebut sudah berada pada golongan miskin, dengan bertambahnya anak dapat menambah tingkat kemiskinan dari sebuah keluarga atau rumah tangga tersebut.

Dengan demikian kepala rumah tangga tidak hanya menfokuskan pada segi pengeluaran tetapi juga pada standar hidup atau perumahan yang layak yang dijadikan sebagai indikator kemiskinan pada standar hidup. Semakin bertambahnya anak atau beban ketergantungan maka semakin besar peluang rumah tangga untuk menjadi berstatus miskin bukan hanya pada pengeluaran tetapi juga pada standar hidup atau perumahan yang ditempati.

B. Penelitian terdahulu

Kajian penelitian yang relevan ini adalah bagian yang menguraikan tentang beberapa pendapat atau hasil yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti. Penelitian yang relevan dengan penelitian tersebut adalah:

1. Amartya sen (2000) menemukan bahwa pekerjaan kepala rumah tangga, partisipasi kepala rumah tangga dipasar tenaga kerja, pendidikan dan lokasi berpengaruh signifikan terhadap determinan kemiskinan.
2. Syamsul amar (2012) menemukan bahwa lokasi geografis, beban ketergantungan, jenis pekerjaan, tingkat pendidikan, ketersediaan listrik berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan rumah tangga di Sumatera Barat. Sedangkan gender kepala rumah tangga dan kondisi kesehatan berpengaruh tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan rumah tangga di Sumatera Barat.
3. Setyo Budiantoro, dkk (2013) menemukan bahwa dengan menggunakan pendekatan konsumsi (*basic need*) dengan batas garis kemiskinan USD 1.25 dan USD 2 PPP menunjukkan perbedaan terhadap pengukuran kemiskinan dengan menggunakan *multidimensional poverty index* (MPI) Dimana menggunakan pengukuran USD 2 PPP tingkat kemiskinan mencapai 117.4 % sedangkan menggunakan MPI sebesar 73.6% hal ini berarti bahwa pengukuran MPI menunjukkan angka kemiskinan di Indonesia lebih sedikit daripada menggunakan indikator USD 2 PPP.

C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual ini dimaksudkan sebagai untuk menjelaskan, mengungkapkan dan menentukan persepsi keterkaitan antar variabel-variabel yang akan diteliti berdasarkan permasalahan keterkaitan maupun antara variabel yang diteliti dari teori yang dikemukakan sebelumnya.

Sebagaimana yang telah dikemukakan pada bagian terdahulu faktor-faktor yang mempengaruhi status kemiskinan rumah tangga yang terlihat pada pendekatan non moneter dengan indikator standar hidup sebagai variabel *dependent* (Y) yaitu: kemiskinan rumah tangga yang merupakan kemiskinan yang dimiliki dengan melihat standar hidup dengan indikator bahan bakar yang digunakan untuk memasak, sanitasi yang memadai, jenis dinding tempat pembuangan akhir tinja, status kepemilikan rumah serta informasi dan komunikasi yang dikuasai. Variabel status kemiskinan rumah tangga pada standar hidup (Y) dipengaruhi oleh beberapa variabel *independent* (X) tingkat pendidikan kepala rumah tangga, jenis pekerjaan kepala rumah tangga, gender kepala rumah tangga dan beban ketergantungan.

Variabel tingkat pendidikan kepala rumah tangga (X1) mempunyai pengaruh positif terhadap status kemiskinan rumah tangga pada standar hidup di kecamatan Kuranji (Y). Semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin sedikit peluang untuk menjadi miskin, karena dengan tingginya pendidikan maka akan dapat terhindar dari kemiskinan terutama yang focus pada kemiskinan standar hidup di dalam sebuah rumah tangga. Semakin tinggi tingkat pendidikan semakin berkurangnya tingkat kemiskinan yang dimiliki

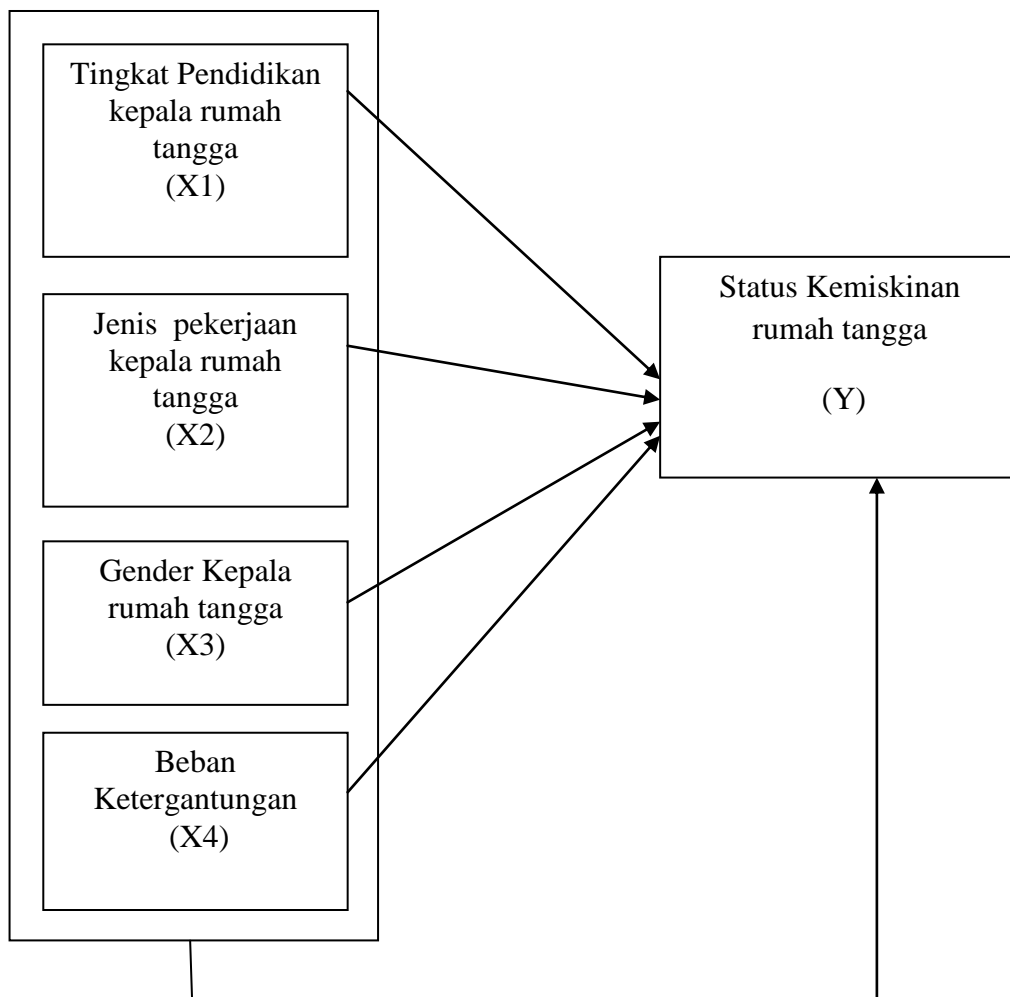
oleh rumah tangga. Dengan berbedanya tingkat pendidikan maka semakin terlihatnya perbedaan status kemiskinan yang diperoleh oleh sebuah rumah tangga.

Untuk variabel jenis pekerjaan kepala rumah tangga (X2) berpengaruh positif terhadap status kemiskinan rumah tangga di kecamatan Kuranji (Y). Sebagaimana yang telah disebutkan pada teori diatas, umumnya rumah tangga yang miskin berada pada pekerjaan pertanian, dimana jenis pekerjaan menunjukkan kemampuan seorang kepala rumah tangga untuk menghasilkan atau bahkan memperlihatkan status kemiskinan. Kepala rumah tangga yang memiliki jenis pekerjaan yang baik dan memadai mungkin akan memperoleh status yang tidak miskin atau sebaliknya jika kepala rumah tangga memiliki jenis pekerjaan yang kurang memadai bisa dikatakan rumah tangga tersebut dikatakan miskin.

Kemudian variabel gender kepala rumah tangga (X3) berpengaruh positif terhadap status kemiskinan rumah tangga di kecamatan Kuranji (Y). Rumah tangga yang dikepalai oleh pria atau wanita cenderung menentukan status kemiskinan sebuah rumah tangga. Apabila rumah tangga di kepalai oleh pria maka kemiskinan dapat diminisir dibandingkan dengan wanita. karena apabila dikepalai oleh wanita maka tingkat kemiskinan rentan akan dapat terjadi dibandingkan dengan pria.

Beban ketergantungan (X4) berpengaruh positif terhadap status kemiskinan rumah tangga pada standar hidup di kecamatan Kuranji (Y) karena semakin banyak anggota rumah tangga semakin besar pengeluaran kebutuhan

yang akan dikeluarkan sehingga untuk mendapatkan standar hidup yang layak juga akan semakin sedikit karena itu beban ketergantungan sangat mempengaruhi status kemiskinan dimana dilihat dari banyaknya anggota rumah tangga yang memiliki usia produktif karena apabila sudah memiliki usia produktif maka beban ketergantungan yang dimiliki oleh rumah tangga juga akan berkurang. untuk lebih jelas dapat digambarkan seperti yang terlihat dibawah ini:



Gambar 1. Kerangka Konseptual Pengaruh Variabel-Variabel Non-Ekonomi Terhadap Status Kemiskinan Rumah tangga di Kota Padang (Studi Kasus Kecamatan Kuranji)

D. Hipotesis

Berdasarkan perumusan masalah seperti yang telah diuraikan dalam bab 1 serta dengan berpedoman kepada kerangka konseptual seperti diatas, maka hipotesis yang dapat dibentuk adalah sebagai berikut:

1. Tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap status kemiskinan rumah tangga di kecamatan Kuranji.

$$H_0: \beta_1 = 0$$

$$H_a: \beta_1 \neq 0$$

2. Jenis pekerjaan kepala rumah tangga berpengaruh signifikan terhadap status kemiskinan rumah tangga di kecamatan Kuranji.

$$H_0: \beta_2 = 0$$

$$H_a: \beta_2 \neq 0$$

3. Gender kepala rumah tangga berpengaruh signifikan terhadap status kemiskinan rumah tangga di kecamatan Kuranji.

$$H_0: \beta_3 = 0$$

$$H_a: \beta_3 \neq 0$$

4. Beban ketergantungan berpengaruh signifikan terhadap status kemiskinan rumah tangga di kecamatan Kuranji.

$$H_0: \beta_4 = 0$$

$$H_a: \beta_4 \neq 0$$

5. Tingkat pendidikan, Jenis pekerjaan, gender kepala rumah tangga dan beban ketergantungan berpengaruh signifikan terhadap status kemiskinan rumah tangga di kecamatan Kuranji.

$$H_0: \beta_1 = \beta_2 = \dots = \beta_n = 0$$

$$H_a: \text{salah satu } \beta_i \neq 0$$

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil pengolahan dan pembahasan terhadap hasil penelitian antara variabel bebas terhadap variabel terikat seperti yang telah dijelaskan pada BAB IV, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Tingkat pendidikan kepala rumah tangga (X_1) memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap status kemiskinan rumah tangga di kecamatan Kuranji (Y) yang artinya semakin kecil tingkat pendidikan kepala rumah tangga maka akan semakin besar peluang rumah tangga untuk berstatus miskin. Sebaliknya semakin tinggi tingkat pendidikan semakin besar peluang rumah tangga untuk tidak berstatus miskin.
2. Jenis pekerjaan kepala rumah tangga (X_2) memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap status kemiskinan rumah tangga di kecamatan Kuranji (Y). yang artinya kepala rumah tangga yang bekerja di sektor pertanian, buruh dan sopir cenderung untuk berstatus miskin dari pada kepala rumah tangga yang bekerja di lainnya seperti pegawai, guru, wiraswasta dll.
3. Gender kepala rumah tangga (X_3) memiliki pengaruh yang positif dan tidak signifikan terhadap status kemiskinan rumah tangga di kecamatan Kuranji (Y). Rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan memiliki cenderung tergolong miskin dibandingkan kepala rumah tangga nya adalah

laki-laki. Namun variabel ini memiliki pengaruh yang tidak signifikan. Hasil ini disebabkan oleh banyaknya perempuan yang terlibat dalam pasar tenaga kerja dengan pekerjaan yang baik dan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga.

4. Beban ketergantungan (X_4) memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap status kemiskinan rumah tangga dikecamatan Kuranji (Y) yang berarti peningkatan 1 unit penambahan beban ketergantungan berpengaruh signifikan dalam meningkatkan resiko rumah tangga untuk berstatus miskin.
5. Secara bersama-sama variabel tingkat pendidikan (X_1) jenis pekerjaan (X_2), gender kepala rumah tangga (X_3), beban ketergantungan (X_4), memiliki pengaruh yang signifikan terhadap status kemiskinan rumah tangga di kecamatan Kuranji (Y).

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan di atas, maka dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Tingkat pendidikan kepala rumah tangga merupakan faktor yang mempengaruhi status kemiskinan rumah tangga. Oleh sebab itu kesadaran kepala rumah tangga akan tingginya tingkat pendidikan sangat dianjurkan untuk kepentingan anggota rumah tangga. tingkat pendidikan digunakan untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik dan memiliki penghasilan yang besar sehingga rumah tangga memiliki kehidupan yang lebih baik terutama pada standar hidup atau perumahan yang layak.

2. Jenis pekerjaan kepala rumah tangga sangat penting dalam menjadi kesejahteraan dalam rumah tangga. Maka dari itu disarankan adanya peningkatan pelayanan pendidikan dan keterampilan bagi kepala rumah tangga dari rumah tangga miskin, seperti kejar paket A bagi kepala rumah tangga yang miskin kegiatan penyuluhan pertanian atau peningkatan keterampilan usaha sehingga meningkatnya penghasilan.
3. Gender kepala rumah tangga meskipun tidak berpengaruh signifikan tapi tetap perlu memperoleh perhatian. kebijakan yang dilakukan yaitu melakukan pemberdayaan ekonomi bagi perempuan usaha mikro, kecil dan menengah terutama pada perempuan dari rumah tangga miskin yang menjadi kepala rumah tangga. Dengan adanya penyuluhan tersebut, maka rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan dapat mandiri dan mendapatkan penghasilan yang lebih baik sehingga terhindar dari kemiskinan.
4. Beban ketergantungan merupakan faktor yang juga sangat berpengaruh terhadap status kemiskinan rumah tangga. Oleh sebab itu masyarakat harus bisa mengendalikan jumlah anggota keluarga dengan ikut pada program keluarga berencana yang tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhirmen, 2012. *Statistika 1 (Teori dan Aplikasi)*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. 2012.
- Amar, Syamsul. 2012. “*Analisis Kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat dalam Perspektif Ekonomi*”. Laporan Hasil Penelitian Professor.
- Ambaryanto. 2013 . *Kemiskinan Multidimensi Pada Anak*. Jurnal Ekonomi Vol. 8 No 2 Oktober 2013.
- Anggraeni, Dian Ayu. 2009. *Profil Rumah Tangga Miskin dan Faktor Determinan Kemiskinan di Kabupaten Bogor*. Tesis. FE UI.
- Arsyad, Lincoln. 2000. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: Sekolah tinggi ilmu ekonomi.
- Arikunto, Suharmasimi. 2002. *Dasar evaluasi pendidikan*, Jakarta. Bumi Aksara.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. 2012. *Kajian dan Penetapan Keluarga Miskin HPPLS 2011 di Kota Padang*.
- Badan Pusat Statistik. 2000. *Sensus Penduduk*. Padang: BPS.
- _____. 2013. *Padang Dalam Angka*. Publikasi BPS Provinsi Sumatera Barat.
- _____. 2013. *Sumatera Barat Dalam Angka*. Publikasi BPS Provinsi Sumatera Barat.
- _____. 2014. *Indikator Kesejahteraan Rakyat*. Padang: BPS.
- _____. 2014. *Indikator Sosial Ekonomi Sesumatera*. Padang: BPS.
- _____. *Survei Sosial Ekonomi Nasional 2012*. BPS Sumatera Barat. Sumatera Barat.
- _____. *Survei Sosial Ekonomi Nasional 2013*. BPS Sumatera Barat. Sumatera Barat.
- BKKBN. 2005. *Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Kebijakan Program dan Kegiatan Tahun 2005-2009*, BKKBN.